



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOB - SP DIPA- 025 04 2 664772/2025

A Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Peribendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

 1. Kementerian Negara/Lembaga : (025)
 2. Unit Organisasi : (04)
 3. Provinsi : (34)
 4. Kode/Nama Satker : (664772)

Sebesar : Ro. 4

ntuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

nde dan Nama Program dan Kegiatan :

c). Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni
2. PNBP

- . Pinjaman/Hibah Luar Negeri
- Pinjaman Luar Negeri

Hiball Equal Negligible

1. KPPN MAMUJU

1 DIPA Petikan ini merimakan hadian yang tidak

DIPA Perikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).

• PIPA Perlitikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan saikker dan pencairan dana/oengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Donovan Donnellan and Daniel Dorkin from London

Perlu diingat bahwa dalam peraturan ini tidak diperlukan persetujuan dari negara-negara lain untuk melaksanakan perjanjian ini.

anggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam BIPA pelikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

LUKY ALFIRMAN
NIP. 1970032719950310
ttd.